

ABSTRAK

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara umum ada beberapa hak pekerja yang harus dilindungi, diantaranya hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan secara sama, hak atas rahasia pribadi, hak atas kebebasan suara hati. Permasalahan yang terumuskan dalam identifikasi masalahnya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pekerja atas peralihan sebagian saham perusahaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (studi kasus PT. Asfalt Nusantara) dan apa saja faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak pekerja atas peralihan sebagian saham perusahaan. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja atas peralihan sebagian saham perusahaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (studi kasus PT. Asfalt Nusantara) dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak pekerja atas peralihan sebagian saham perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dengan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulannya Perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja atas akuisisi perusahaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja studi kasus PT. Asfalt Nusantara yaitu Perlindungan ekonomis, Perlindungan sosial, Perlindungan teknis dan Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak pekerja atas akuisisi perusahaan yaitu 1) Faktor regulasi 2) Faktor budaya baik pekerja 3) Pemberi kerja dan penerima kerja seimbang kedudukannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Pekerja, Cipta Kerja

ABSTRACT

Article 1 point 3 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower stipulates that every person who works receives wages or other forms of remuneration. Based on the provisions of Article 1 point 2 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, it is determined that everyone who is able to do work to produce goods and or services both to meet their own needs and for the community. In general, there are several workers' rights that must be protected, including the right to work, the right to a fair wage, the right to associate and assemble, the right to security and health protection, the right to be legally processed, the right to be treated equally, the right to confidentiality. privacy, the right to freedom of conscience. The problem formulated in the identification of the problem is how the legal protection of labor rights for the transfer of part of the company's shares in terms of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (case study of PT. Asfalt Nusantara) and what are the factors causing the non-fulfillment of these rights. workers' rights to the transfer of part of the company's shares. The purpose of the research is to find out how the legal protection of labor rights for the transfer of part of the company's shares in terms of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation (case study of PT. Asfalt Nusantara) and to find out what are the factors causing the non-fulfillment of these rights. workers' rights to the transfer of part of the company's shares. The research method used is a qualitative method with a normative juridical approach, In conclusion, the legal protection of labor rights for company acquisitions in terms of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, case study of PT. Asphalt Nusantara, namely economic protection, social protection, technical protection and factors that cause workers' rights not to be fulfilled on company acquisitions, namely 1) regulatory factors, 2) good cultural factors for workers 3) employers and job recipients are balanced in position.

Keywords: Legal Protection, Labor Rights, Job Creation